

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu di ukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana / anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Disamping itu beberapa maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan lakip ini , antara lain adalah :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pangkep tahun 2013.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB tahun 2013.
4. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB terhadap kemampuan dana / anggaran yang di kelola.
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Adapun Pertanggung Jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2012 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga unsur Penyelenggara Negara, untuk mempertanggung Jawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan mengolah sumber daya dengan di dasarkan pada suatu perencanaan .

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Lakip

Penyusunan Lakip Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Pangkep tahun anggaran 2013 sepenuhnya mengacu pada rencana strategik dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Adapun landasan hukum penyusunan lakip ini sebagai berikut :

1. Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
11. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi HAM;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang PengarusUtamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pangkep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep (Lembaran Daerah Kabupaten pangkep Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB).

Adapun Fungsi BPPKB meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB .
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penyusunan Lakip

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Lakip
- 1.3 Sistematika Penyusunan Lakip

BAB II : PERENCANAAN STRATEJIK

- 2.1 Visi, Misi, dan Nilai
- 2.2 Analisis Stratejik
- 2.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.4 Strategi
 - 2.4.1 Kebijakan
 - 2.4.2 Program
 - 2.4.3 Kegiatan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013
- 3.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013
- 3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013

BAB IV : PENUTUP (KESIMPULAN)

DAFTAR LAMPIRAN :

- Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013
- Lampiran II Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013
- Lampiran III Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013
- Lampiran IV Struktur Organisasi

BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

2.1 Visi, Misi dan Nilai

Visi

“ Perempuan dan laki - laki memang beda tetapi tidak untuk dibeda - bedakan dan semua keluarga ikut Keluarga Berencana (KB) ”.

Misi

1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan
2. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam pengaturan kelahiran
3. Peningkatan kesejahteraan dan Memperkuat Ketahanan keluarga
4. Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Nilai

Adapun nilai - nilai luhur yang dianut dan di implementasikan pada sepanjang kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

1. Perlunya setiap Desa / Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator di desa.
2. Setiap Kecamatan memiliki pusat Informasi dan konseling dan kesehatan reproduksi remaja.
3. Setiap Desa / kelurahan mempunyai Penyuluh KB.
4. Seluruh anggota keluarga yang memiliki anak balita, aktif menjadi anggota Bina keluarga Balita (BKB).
5. Setiap Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I diharapkan menjadi Kelompok UPPKS dan memiliki usaha dan memiliki usaha ekonomi produktif.
6. Menciptakan peluang antara perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran dalam proses pembangunan dan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan prinsip hak menurut keadilan.

2.2 Analisis Stratejik

Melalui hasil analiisa stratejik yang dapat di manfaatkan untuk menjembatani hambatan-hambatan dan persoalan-persoalan yang ada, maka beberapa faktor kunci yang perlu di perhatikan dalam perumusan suatu kebijakan adalah antara lain, Lingkungan stratejik baik di Internal Organisasi maupun

lingkungan eksternal organisasi yang bisa menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Beberapa faktor-faktor dalam lingkungan stratejik dimaksud adalah seperti berikut :

2.2.1 Kekuatan :

- a. Perda Nomor 12 Tahun 2007.
- b. Dukungan Pimpinan.
- c. Tenaga Fungsional (Penyuluh KB).
- d. Sarana dan Prasarana.

2.2.2 Kelemahan :

- a. SDM Aparat terbatas.
- b. Anggaran belum memadai .
- c. Penyediaan Alkon Kurang.
- d. Perencanaan yang belum maksimal.

2.2.3 Peluang :

- a. Koordinasi Iinstansi terkait.
- b. Program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
- c. Terbentuknya kontribusi masyarakat.
- d. Dukungan kader dan kelompok perempuan di pedesaan.

2.2.4 Tantangan :

- a. Wilayah Geografis yang sulit.
- b. Minat dan daya kritis masyarakat cukup tinggi.
- c. Partisipasi kelompok kegiatan rendah.
- d. Dukungan tokoh masyarakat melemah.

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

1. Memperkokoh Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan KB.
3. Meningkatkan Akses Pemberdayaan Perempuan dan KB di berbagai masyarakat dalam keluarga sejahtera

4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta tokoh formal dan informal serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kualitas keluarga dengan harapan masa depan yang lebih baik agar timbul rasa tenang, serta kesejahteraan lahir batin dalam jumlah anak yang ideal.
5. Meningkatkan akses informasi, pengembangan dan Pembinaan yang berorientasi pada keluarga berencana, kemiskinan, kesetaraan gender dan kerentanan social.
6. Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan serta mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam rangka mengembangkan keluarga kecil berkualitas.
7. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lansia dalam rangka pembangunan.
8. Keluarga kecil berkualitas serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, peningkatan kualitas hidup lansia dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
9. Peningkatan pengetahuan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak – hak reproduksi guna meningkatkan derajat Kesehatan reproduksinya dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga untuk mendukung upaya kualitas generasi mendatang.

2.3.2 Sasaran

1. Pembangunan Daerah berspektif gender .
2. Pengembangan kemitraan sejajar yang harmonis antara perempuan dan laki - laki
3. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja
4. Pengukuran Indikator Kinerja
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
6. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan
7. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program KB

8. Menata kembali Pengelolaan Program KB
9. Memperkuat SDM Operasional Program KB
10. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Pelayanan KB

2.4 Strategi

2.4.1 Kebijakan

Secara umum ini kebijakan yang tepat di dalam pelaksanaan pengelolaan melandasi bidang KB dan Pemberdayaan Perempuan melalui upaya-upaya yang diarahkan untuk :

- a. Menata kembali program dan jejaringan KB.
- b. Memberdayakan dan mengarahkan masyarakat untuk membangun keluarga dengan jumlah anak ideal.
- c. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga akses kualitas pelayanan.
- d. Meningkatkan promosi, perlindungan dan perwujudan hak-hak reproduksi.
- e. Melakukan advokasi dan sosialisasi.
- f. Mengembangkan kemitraan sejajar yang harmonis antara perempuan dan laki – laki.
- g. Memperluas kesempatan pendidikan bagi anak perempuan.

2.4.2 Program

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Negara, dimana Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.
7. Program Keluarga Berencana .
8. Program Pelayanan Kontrasepsi.
9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
11. Kesehatan Reproduksi Remaja.
12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
14. Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.
15. Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

2.4.3 Kegiatan

Seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPPKB adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- f. Peningkatan Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
- g. Administrasi Ketatausahaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :

- a. Penyusunan RKA SKPD
- b. Penyusunan Rencana Strategi SKPD

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Penyusunan Standar Operasional Minimal (SOP) SKPD

7. Program Keluarga Berencana, meliputi :

- a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

8. Program pelayanan Kontrasepsi, meliputi :

- a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB bersama TKBK
 - ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- b. Pelayanan KB melalui Momentum TMKK, Bhayangkara, PKK - KB – KES
 - ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, meliputi :

- a. Orientasi Bagi PPKBD dan Sub PPKBD
 - ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 - ❖ Honor / Upah Tukang / Buruh / Kader
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Spanduk
 - ❖ Belanja Penggandaan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, meliputi :

- a. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
 - ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 - ❖ Honor / Upah Tukang / Buruh / Kader
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Spanduk
 - ❖ Belanja Penggandaan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, meliputi :

- a. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, meliputi :

- a. Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesenjangan Gender, pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak
 - ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 - ❖ Honorarium Peserta
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Penggandaan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, meliputi :

- a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 - ❖ Honorarium Peserta
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Penggandaan

- ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- b. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 - ❖ Honorarium Peserta
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Spanduk
 - ❖ Belanja Penggandaan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, meliputi :

- a. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
- ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 - ❖ Honorarium Peserta
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Spanduk
 - ❖ Belanja Penggandaan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Peserta

15. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, meliputi :

- a. Pembinaan P2WKSS
- ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
 - ❖ Belanja Bahan Baku Bangunan
 - ❖ Belanja Dokumentasi
 - ❖ Belanja Spanduk
 - ❖ Belanja Penggandaan
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Rapat
 - ❖ Belanja Makanan & Minuman Tamu
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

b. GSI (Gerakan Sayang Ibu)

- ❖ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- ❖ Belanja Alat Tulis Kantor
- ❖ Belanja Bahan Baku Bangunan
- ❖ Belanja Dokumentasi
- ❖ Belanja Spanduk
- ❖ Belanja Penggandaan
- ❖ Belanja Makanan & Minuman Tamu
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Berdasarkan Skala prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2013, maka beberapa rencana kerja yang dimaksud meliputi program-program sebagai berikut :

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Administrasi Ketatausahaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

- Pembangunan Gedung Kantor (DAU)
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU)
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK)
- Pembangunan Gedung Kantor (DAK)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi :

- Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :**
 - Penyusunan RKA SKPD
 - Penyusunan Rencana Strategi SKPD

- 6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah meliputi :**
 - Penyusunan Standar Operasional Minimal (SOP) SKPD

- 7. Program Keluarga Berencana, meliputi :**
 - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

- 8. Program pelayanan Kontrasepsi, meliputi :**
 - Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan KB melalui Momentum TMKK, Bhayangkara, PKK - KB – KES

- 9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, meliputi :**
 - Orientasi Bagi PPKBD dan Sub PPKBD

- 10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, meliputi :**
 - Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

- 11. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, meliputi :**
 - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

- 12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, meliputi :**
 - Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak

- 13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, meliputi :**
 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, meliputi :

- Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

15. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan meliputi :

- Pembinaan P2WKSS
- GSI (Gerakan Sayang Ibu)

" Lihat Lembar Lampiran I Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2013 "

3.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013

Adapun indikator yang menjadi Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Rencana Anggaran : Rp. 156.097.961,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 143.735.409,-
- Capaian Target : 92,08 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Rencana Anggaran : Rp. 1.481.614.241,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 1.266.890.575,-
- Capaian Target : 85,51 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Rencana Anggaran : Rp. 46.125.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 45.837.000,-
- Capaian Target : 99,38 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Rencana Anggaran : Rp. 13.490.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 13.090.000,-
- Capaian Target : 97,03 %

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- ▣ Penyusunan RKA SKPD

- Rencana Anggaran : Rp. 6.050.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 5.850.000,-
- Capaian Target : 96,69 %

▣ Penyusunan Rencana Strategi SKPD

- Rencana Anggaran : Rp. 6.200.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.200.000,-
- Capaian Target : 100 %

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

▣ Penyusunan Standar Operasional Minimal (SOP) SKPD

- Rencana Anggaran : Rp. 5.150.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 4.850.000,-
- Capaian Target : 94,17 %

7. Program Keluarga Berencana

▣ Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

- Rencana Anggaran : Rp. 24.918.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 24.917.200,-
- Capaian Target : 100,00 %

▣ Pemuktahiran Data Keluarga

- Rencana Anggaran : Rp. 20.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
- Capaian Target : 0.00 %

8. Program pelayanan Kontrasepsi

▣ Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB bersama TKBK

- Rencana Anggaran : Rp. 14.965.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 13.714.500,-
- Capaian Target : 79,14 %

▣ Pelayanan KB melalui Momentum TMKK, Bhayangkara, PKK - KB – KES

- Rencana Anggaran : Rp. 15.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- Capaian Target : 66,67 %

9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

- Orientasi Bagi PPKBD dan Sub PPKBD
 - Rencana Anggaran : Rp. 15.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 13.500.000,-
 - Capaian Target : 90,00 %

- 10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
 - Rencana Anggaran : Rp. 13.500.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
 - Capaian Target : 0,00 %

- 11. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
 - Rencana Anggaran : Rp. 9.750.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 9.195.000,-
 - Capaian Target : 94,31 %

- 12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak
 - Rencana Anggaran : Rp. 10.600.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 10.450.000,-
 - Capaian Target : 98,58 %

- 13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - Rencana Anggaran : Rp. 10.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 9.700.000,-
 - Capaian Target : 97,00 %

 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Rencana Anggaran : Rp. 92.150.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 86.031.400,-
 - Capaian Target : 93,36 %

- 14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

☐ Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

- Rencana Anggaran : Rp. 13.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 12.650.000,-
- Capaian Target : 97,31 %

15. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

☐ Pembinaan P2WKSS

- Rencana Anggaran : Rp. 26.440.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 26.434.500,-
- Capaian Target : 99,98 %

☐ GSI (Gerakan Sayang Ibu)

- Rencana Anggaran : Rp. 17.985.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 17.977.250,-
- Capaian Target : 99,96 %

"Lihat Lembar Lampiran II, Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 Serta Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013 dalam Daftar Rencana & Realisasi serta Target yang dicapai Kegiatan - kegiatan dari Program".

3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013

Berdasarkan Indikator Pengukur di dalam Pencapaian Sasaran maka untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana Aparatur

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana Aparatur	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	80,00	80,00	100,00
	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Sarana & Prasarana	%	84,00	84,00	100,00
			Rata - Rata Pencapaian			100.00

2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Laporan Tepat Waktu	%	95,00	95,00	100,00
			Rata - Rata Pencapaian			100.00

3. Terkendalinya Jumlah Penduduk Melalui Keluarga Berencana

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Terkendalinya Jumlah Penduduk Melalui Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	20,50	25,54	80,27
	Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Peserta KB Aktif	%	74,00	114,97	155,36
		Cakupan Peserta KB Baru	%	100,00	89,51	89,51
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD - Sub PPKBD)	Org	430	423	98,37
	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Bina Keluarga Balita (BKB)	Klp	15	26	173,33
		Bina Keluarga Remaja (BKR)	Klp	13	5	38,46
		Bina Keluarga Lansia (BKL)	Klp	10	3	30,00
				Rata - Rata Pencapaian		

Pencapaian hanya mencapai 95,04% dikarenakan beberapa indikator kinerja tidak mencapai 100% diantaranya :

1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (80,27%)
2. Cakupan Peserta KB Baru (89,51%)
3. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD – Sub PPKBD) (98,37%)
4. Bina Keluarga Remaja (BKR) (38,46%)
5. Bina Keluarga Lansia (BKL) (30,00%)

4. Pembangunan Peranan Perempuan & Kesetaraan Gender

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Pembangunan Peranan Perempuan & Kesetaraan Gender	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah	%	57,50	56,00	97,39
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,00	43,11	71,84
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0,00	0,00	100,00
	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	Keg	1	1	100,00
		Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu	Keg	1	1	100,00
			Rata - Rata Pencapaian		93.85	

Sasaran hanya mencapai 93,85% dikarenakan ada salah satu indikator kinerja tidak mencapai 100% yaitu Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah (97,39%) dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

Pengukuran Pencapaian Sasaran di maksud dapat dilihat selengkapnya pada :

"Lembar Lampiran III Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013 "

BAB IV

KESIMPULAN

Bahwa untuk lebih berdaya guna & berhasil guna, setiap perencanaan program yang akan dilaksanakan tentunya perlu bertolak dari keadaan serta kondisi yang ada dan telah dilalui sebelumnya. Melalui hasil evaluasi dan laporan yang ada dengan melihat skala yang sangat diperlukan di masyarakat, sehingga tentunya LAKIP ini di harapkan dapat menjadi jembatan dalam kesinambungan pembangunan di bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB di Kabupaten Pangkep sesuai yang diarahkan dalam Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

Selain itu pula Penyusunan LAKIP tahun 2013 ini dapat menjadi gambaran sekaligus informasi tentang sejauh mana Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dalam penulisan ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kekhilafan yang ada didalamnya sehingga masukan dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan untuk pengembangan selanjutnya kearah yang lebih baik.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban bagi setiap instansi pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang diembannya baik keberhasilan dan ataupun kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan telah ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintahan, dengan demikian adalah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun LAKIP setiap tahun.

Sehubungan dengan itupula, untuk memudahkan dalam penyusunan LAKIP, telah ditetapkan keputusan Kepala LAN No. 589 / AX / 6 / T / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berusaha menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2013 sebagai berikut :

1. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diamanatkan, dan telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Pelaksanaan Tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mendapat alokasi anggaran melalui APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 dan DAK Tahun 2013.
3. Keterbatasan ruang lingkup pengukuran kinerja yang hanya didasari pada pendapatan, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja publik yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Disadari penyajian LAKIP 2013 ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak serta masih terdapat kekurangan didalamnya, olehnya saran dan kritik sangat diharapkan guna penyempurnaannya, khususnya pada penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan adanya LAKIP ini diharapkan juga dapat menjadi gambaran pada tujuan dan program yang dibidang Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pangkajene, 10 Februari 2014

K E P A L A

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB

dr. Hj. ANDI MULIATI HALID, M. Kes

Pembina Utama Muda
19611107 198911 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan LAKIP	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Sistematika Penyusunan LAKIP	3
BAB II : Perencanaan Stratejik	5
2.1 Visi Misi dan Nilai	5
2.2 Analisis Stratejik	5
2.3 Tujuan dan Sasaran	6
2.4 Strategi	8
2.4.1 Kebijakan	8
2.4.2 Program	8
2.4.3 Kegiatan	9
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013	14
3.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013	16
3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2013	19
BAB IV : Kesimpulan	22
Ringkasan Eksekutif	23
Lampiran :	
I. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013	25
II. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013	29
III. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013	33
IV. Struktur Organisasi	35
V. Daftar Hadir Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	36